

PTPN VIII akan Digugat Soal Lahan Megamendung

MEGAMENDUNG (IM) - Kasus tanah di PTPN VIII di Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor hingga saat ini belum selesai. Kuasa hukum PTPN VIII, Ikbar Firdaus Nurahman mengatakan di antara pihak ketika yang diberi surat somasi oleh mereka kini malah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ikbar mengatakan gugatan itu menunjukkan tak ada niat baik dari pihak yang dianggap menyerobot tanah PTPN VIII itu untuk menyerahkan kembali aset perusahaan negara itu. Ikbar menyebut pihak-pihak tersebut sebagai mafia tanah.

"Jadi pelaporan pidana terhadap mereka, kami lanjut," ujar Ikbar, Sabtu (6/3). Ia yakin pihak kepolisian juga telah menginventarisasi masalah penyerobotan tanah mereka oleh para mafia.

"Bukti alas hak para penyerobot yang akan mengajukan gugatan itu jadi bukti tambahan untuk pelaporan pidana praktek mafia tanah," kata Ikbar.

Ikbar mengungkapkan praktik pengoperasian lahan PTPN oleh para mafia tanah itu tak hanya dilakukan oleh para pejabat wilayah setingkat RT, RW atau kepala desa, tapi juga melibatkan nama-nama besar.

Ikbar menyebut, sebagian

nama besar sudah mengembalikan lahan dengan kesadarannya karena apa yang dilakukan oleh mereka memang melawan hukum. Ikbar sangat yakin negara tidak akan kalah dengan praktik mafia tanah seperti ini.

Apalagi kata dia Kapolri telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut praktik mafia tanah.

"Apalagi lahan PTPN yang notabene aset milik negara itu sudah menjadi kewajiban antar lembaga terkait untuk menyelamatkannya," kata Ikbar.

Pelbagai modus dan perlawanan yang dilakukan oleh penyerobot lahan milik PTPN VIII, menurut Ikbar, justru itu semakin menguatkan dugaannya ada praktik oper alih lahan yang dilakukan oleh mafia tanah di Megamendung dengan menjanjikan bisa disertifikatkan.

Padahal, menurut Ikbar, secara yuridis PTPN memiliki hak sepenuhnya atas lahan yang dikeluarkan SK-HGU nya sejak tahun 1973 itu.

"Mafia Tanah di Megamendung itu biong-biongnya. Mereka kemas cerita over alih garapan dan dijanjikan bisa disertifikatkan, sehingga kami yakin Sk yang mereka keluarkan itu ilegal karena sampai saat ini kami tidak pernah mengeluarkan SK lainnya," ucap Ikbar. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN LINTAS SUMATERA

Pekerja menyelesaikan pembangunan Jembatan Merangin 2 di samping Jembatan Merangin, Jalan Lintas Sumatera Jambi-Sumbar, Bangko, Merangin, Jambi, Minggu (7/3). Pembangunan jembatan di atas pertemuan arus Sungai Batang Merangin dan Sungai Batang Mesumai dengan nilai proyek Rp58 miliar dari APBN tersebut ditargetkan selesai dalam tahun ini.

LALU LINTAS AKHIR PEKAN PADAT

Kota Bogor Wacanakan Kembali Ganjil Genap

Ditidakkannya ganjil genap dimanfaatkan warga untuk pergi keluar rumah. Oleh karena itu, WaliKota Bogor, Bima Arya akan mengusulkan Satgas Covid-19 melakukan evaluasi pada Selasa (9/3) sambil melihat perkembangan data Covid-19 di Kota Bogor.

BOGOR (IM) - Berbagai ruas jalan di Kota Bogor kembali padat, Sabtu (6/3). Wali Kota Bogor, Bima Arya wacanakan kembali sistem ganjil genap pada libur panjang pekan depan. Ia menilai, meningkatnya volume kendaraan setelah ganjil genap ditiadakan, pekan ini.

Kata Bima, ditiadakkannya ganjil genap dimanfaatkan warga untuk pergi keluar rumah. Oleh karena itu, Bima akan mengusulkan Satgas Covid-19 melakukan evaluasi pada Selasa (9/3) sambil melihat perkembangan data Covid-19 di Kota Bogor. "Saya akan mengusulkan

kepada Satgas, hari Selasa kita evaluasi lagi lah. Ini juga mengantisipasi libur panjang. Apakah betul-betul minggu depan juga kita tidak berlakukan, sambil mempelajari data-data lain," ujar Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor ini, Minggu (7/3).

Bima Arya menegaskan, ganjil genap yang diterapkan di Kota Bogor tidak hanya terkait dengan lalu lintas. Namun, juga sebagai salah satu cara Satgas Covid-19 Kota Bogor menekan laju Covid-19.

"Ini kan bukan hanya soal lalu lintas, tetapi ini soal protokol kesehatan, dan menekan laju Covid-19. Data minggu ini juga kan baru ketahuan minggu depan, jadi kita harus sabar menunggu datanya," ucapnya.

Disepakati

Sebelumnya, Pemkot Bogor meniadakan ganjil genap selama dua pekan. Keputusan itu telah disepakati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor dalam rapat Satgas Covid-19 Kota Bogor, Selasa (2/3).

Namun, pantauan di lapangan, baru satu hari ganjil genap ditiadakan, Sabtu (6/3), kepadatan kendaraan terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Bogor.

"Kalau macet Kota Bogor, Covid-19 naik, itu pembelajaran buat semua. Semuanya main data, kita pakai data semuanya dalam menentukan kebijakan," kata Bima Arya.

Bima Arya mengatakan, saat Pemkot Bogor meniadakan ganjil genap, terjadi peningkatan kendaraan yang

masuk ke Kota Bogor. Padahal, kondisi lalu lintas di kota hujan ini terpantau lengang selama satu bulan terakhir.

Menurutnya, ditiadakkannya ganjil genap dimanfaatkan warga pergi keluar rumah, sehingga jalanan menjadi padat.

Sementara itu, walaupun ganjil genap ditiadakan, tim Crowd Free Road (CFR) yang digagas oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga tetap diteruskan. Tim itu memantau dan mengurai kerumunan.

Tak hanya itu, pengawasan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 di wilayah juga diperketat. Dengan koordinasi yang sempat disimulasikan antara tiga pilar, yakni TNI-Polri dan aparat sipil negara (APR). ● **gio**



IDN/ANTARA

KONTES IKAN MASKOKI HIAS

Warga melihat ikan maskoki saat kontes di Raiser Ikan Hias, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/3). Kontes ikan hias maskoki bertema "4th Indonesian Goldfish League" tersebut diikuti sebanyak 377 peserta dari Jabodetabek.

Operasi PPKM, Polsek Ciomas Jaring 30 Orang tak Bermasker

BOGOR (IM) - Anggota gabungan Polsek Ciomas, Bogor berhasil menjerat puluhan pelanggan protokol kesehatan dalam operasi yustisi di terminal Laladon, Minggu (7/3).

Kapolsek Ciomas, Kompol Endang Kusnandar mengatakan dalam kegiatan operasi PPKM, petugas melakukan pendisiplinan warga dalam mencegah penyebaran Covid-19. Ikut serta anggota TNI, Dishub, dan Satpol PP.

"Kami juga menggelar patroli stasioner dan imbauan kepada warga dan para pedagang selanjutnya menyampaikan imbauan-imbauan agar

pemilik, pedagang/ sopir angkat dan pengunjung agar membiasakan hidup sehat dan bersih dan selalu menjaga jarak guna memutus mata rantai Covid -19," ujarnya kepada wartawan usai acara.

Sementara itu dalam operasi hari ini, lanjut Kompol Endang, bahwa selama kegiatan berlangsung berjalannya tertib, lancar dan aman kondusif namun masih ada beberapa masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sehingga petugas memberikan sanksi sebanyak 33 teguran lisan dan pembagian masker sebanyak 10 buah masker kepada pengguna jalan. ● **gio**

Akibat Terbentur LP2B, 160 Sekolah di Kab. Bogor tak Miliki Izin Operasional

BOGOR (IM) - Sebanyak 160 unit sekolah di berbagai jenjang di Bumi Tegar Beriman terancam dicabut izin operasionalnya karena tak memiliki izin dasar seperti izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan dan lainnya.

Akibat sekolah tak memiliki izin operasional, ijazah ribuan siswa-siswi bukan dikeluarkan oleh tempat sekolahnya belajar dan sekolah tersebut tidak bisa lagi menerima pendaftaran siswa.

"160 sekolah terancam tidak memiliki izin operasional dan juga akan berdampak kepada siswa maupun gurunya karena terbitnya peraturan daerah pendidikan dasar (Perda Dikdas), hingga kami dari DPRD Kabupaten Bogor

memberikan rekomendasi diskresi sebagai payung hukum Bupati Ade Yasin agar sekolah yang sudah berjalan dimudahkan pengurusan izin dasar dan operasionalnya," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Ar-Rasyid kepada wartawan, akhir pekan

kemarin.

Politisi PKB ini merancang alasan 160 sekolah tidak memiliki atau mendapatkan izin dasar dari Pemkab Bogor karena lokasi sekolah berdiri berada di lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B).

"Adanya Perda LP2B Nomor 1 tahun 2019 melarang alih fungsi lahan demi menjaga ketersediaan pangan, kami minta pengecualian agar sekolah yang sudah terban-gun itu akan memiliki izin operasional," terangnya.

Lukman menuturkan bahwa rekomendasi diskresi ini hasil dari keluhan pihak yayasan pendidikan yang meminta pertolongan kepada wakil rakyat beberapa waktu lalu.

"Para pengelola yayasan pendidikan mulai dari TK-SMA datang ke Gedung DPRD Kabupaten Bogor, mereka meminta tolong akan adanya solusi dari permasalahan diatas. Rekomendasi diskresi ini sudah kami kirimkan ke Bupati Ade Yasin pada akhir Februari lalu," tutur Lukman. ● **gio**

UNTUK MENINGKATKAN SDM ASN KAB.BOGOR

Ade Yasin Gandeng Unpad Bandung

CIBINONG (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin melakukan penandatanganan kerjasama antara Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjajaran dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, di RSG UNPAD Bandung, Jumat (5/3).

Hal itu, dilakukan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor, agar lebih inovatif dan kreatif baik dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, juga dalam melayani masyarakat.

Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan, saat ini tantangan permasalahan yang ada di masyarakat semakin kompleks dan dinamis, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga ASN Kabupaten Bogor harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi yang terus berubah-ubah.

Untuk itu ASN dituntut kreatif dan inovatif dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Karenanya, perjanjian kerjasama dengan pihak Unpad, menjadi hal penting yang harus dilakukan.

"Ini sangat tepat di tengah pemberlakuan Work From Home (WFH) 50 persen di lingkup Pemkab Bogor bisa dimanfaatkan ASN untuk meningkatkan ilmu dan meng-

upgrade diri menjadi lebih baik tanpa harus meninggalkan tugas fungsi utamanya," ujar Bupati Bogor.

Menurut Ade, sebagai langkah awal tindak lanjut dari perjanjian kerjasama itu, ia memberikan kesempatan kepada 20 ASN dari 25 ribu ASN, yang berusia minimal 23 tahun maksimal 40 tahun untuk dapat mengikuti pembelajaran pasca sarjana di Universitas Padjajaran Bandung.

"Jumlah ASN kami cukup besar, langkah awal ini harus disambut baik untuk bisa meningkatkan kualitas diri para ASN. Pola bekerja sambil belajar ini dinilai efektif dan bisa langsung diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari," tegas Ade

Lanjut Ade Yasin, kerjasama itu selain untuk meningkatkan kualitas SDM ASN juga ingin meningkatkan kualitas SDM pemuda di Kabupaten Bogor, terutama pemuda berprestasi di bidang olahraga, kesenian, akademik, dan hafidz Qur'an, serta mahasiswa dengan IPK minimal 3,5.

"Tahun ini kita siapkan 1.200 beasiswa bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Bogor. Kami juga sangat mengapresiasi upaya Unpad, atas terselenggaranya kerjasama ini, semoga bisa memberikan manfaat tidak hanya para ASN, juga untuk pemuda dan masyarakat



Bupati Bogor, Ade Yasin, saat melakukan MoU dengan Unpad Bandung.

Kabupaten Bogor," tukasnya.

Sementara, Rektor UNPAD Bandung, Rina Indiatuti mengatakan, kerjasama dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM ASN di Kabupaten Bogor. Sesuai visi dan misi Unpad bahwa Unpad bertugas menghasilkan SDM berkualitas baik lulusan S1,S2, dan S3. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi satu keharusan sejalan dengan program nasional Indonesia emas pada tahun 2045, mungkin akan ada juga Jabar Emas 2045 bahkan Kabupaten Bogor Emas 2045.

"Kita punya niat sama-sama meningkatkan kualitas SDM, semoga kerjasama ini bisa berlanjut tidak hanya sekolah pasca sarja, tapi bisa

berkembang ke kerjasama dalam penelitian, konsultasi dan lainnya, karena kita memiliki dosen dengan kepakaran yang beragam mulai dari kesehatan, sains, budaya dan lainnya," tutur Rina.

Rina mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bupati Bogor, Ade Yasin atas keper-

cayaan yang diberikan kepada pihak Unpad Bandung, dengan menyekolahkan ASN Kabupaten Bogor di Unpad.

"Pada prinsipnya kita siap menyukseskan ketercapaian Visi Misi Kabupaten Bogor, juga juga otomatis dapat mendukung ketercapaian Visi Misi kami," tukasnya. ● **gio**

Terima SK, 1.115 Guru Honorer di Bogor Sah Berstatus PPPK

BOGOR (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin memberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 1.115 guru honorer di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ini bentuk keberpihakan bupati terhadap tenaga honorer yang selama ini mengabdikan diri untuk membangun Kabupaten Bogor," ungkapnya di Cibinong, Bogor, Sabtu (6/3).

Selain guru honorer, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga mengangkat 23 tenaga kesehatan, dan 44 tenaga penyuluh pertanian. Sehingga, keseluruhan ada sebanyak 1.182 pegawai yang diangkat menjadi PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kabupaten Bogor, Zulkifli menerangkan, dari total 1.672 pegawai honorer yang ikut seleksi PPPK pada tahun 2019, ada sebanyak 1.199 pegawai yang lolos.

Namun, sebelum disahkan pada tahun 2021, ada lima pegawai dari tenaga guru yang meninggal dunia, dan 12 pegawai yang mengundurkan diri.

"Maka jika dihitung, jumlah PPPK yang menerima SK tersebut sejumlah 1.182 orang," papar Zulkifli.

Dia memaparkan, ribuan PPPK itu tersebar di beberapa perangkat daerah. Seperti di Dinas Pendidikan atau guru 1.115 orang, Dinas Kesehatan 17 orang, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan 39 orang, Dinas Perikanan dan Peternakan lima orang, RSUD Cileungsi dua orang, RSUD Ciawi satu orang, serya RSUD Cibinong tiga orang.

Menurutnya, penyerahan SK tersebut dilakukan secara bertahap selama lima hari, mulai tanggal 2-5 Maret 2021.

Dalam sehari penyerahannya pun dibagi menjadi tiga sesi demi memenuhi standar protokol kesehatan (prokes). ● **gio**



IDN/ANTARA

POTENSI GEMPA SESAR LEMBANG

Wisatawan berswafoto di atas puncak Gunung Batu yang merupakan bagian dari Sesar Lembang di Pasirwangi, Gunung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (7/3). Peneliti Geoteknologi LIPI Mudrik R Daryono mengatakan Sesar Lembang diprediksi berada pada fase batas akhir siklus terjadinya gempa bumi usai 'tidur' selama 560 tahun dan apabila melepaskan energinya sesar sepanjang 29 kilometer tersebut berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo 6,5 hingga 7.